



**PERATURAN DESA
NOMOR :08 TAHUN 2025**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA PANJUNAN
KECAMATAN SUKODONO**



PERATURAN DESA PANJUNAN
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANJUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026



DESA PANJUNAN
KECAMATAN SUKODONO



KEPALA DESA PANJUNAN
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA PANJUNAN
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANJUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANJUNAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permendes PDPT RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati

- Nomer 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 62 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 13. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan
 14. Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2023 Nomor 02);
 15. Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Panjunan (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2018 Nomor 2);
 16. Peraturan Desa Panjunan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2023 Nomor 7);
 17. Peraturan Desa Panjunan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJM Desa Panjunan Periode Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2024 Nomor 4);
 18. Peraturan Desa Panjunan Nomor 06b Tahun 2025 Tentang RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2025 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN

Dan

KEPALA DESA PANJUNAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
an DAN BELANJA DESA PANJUNAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANJUNAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.387.121.484,00
2. Belanja Desa	Rp	2.034.069.240,69
Surplus/Defisit	Rp	353.052.243,31
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	185.074.786,69
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	538.127.030,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(353.052.243,31)

Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran

Rp

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PANJUNAN.

Ditetapkan di : Desa Panjunan

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Desa Panjunan

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



H. ACH. MIFTACH KURNIAWAN

LEMBARAN DESA PANJUNAN NOMOR 08 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANJUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.291.271.484,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	48.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.387.121.484,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	678.130.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.356.370,69	
5.3.	Belanja Modal	465.982.870,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.034.069.240,69	
	SURPLUS / (DEFISIT)	353.052.243,31	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	185.074.786,69	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	185.074.786,69	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	538.127.030,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	538.127.030,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(353.052.243,31)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PANJUNAN, 31 December 2025
 KEPALA DESA

 KEPALA DESA PANJUNAN, SH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANJUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.291.271.484,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	48.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.387.121.484,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.092.645.461,59</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	867.890.422,79	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	156.053.102,79	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.053.102,79	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.207.320,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.207.320,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	26.680.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	26.680.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	124.210.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	124.210.000,00	
1.1.93		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK;BPKB;dll)	7.500.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24.000.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.325.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.950.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.150.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.950.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.750.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	16.900.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	5.625.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	132.430.038,80	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	132.430.038,80	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.430.038,80	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>735.423.779,10</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13.600.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.500.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	235.332.870,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	94.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	98.032.870,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.050.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.982.870,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	18.200.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.790.909,10	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.395.454,55	PBH, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.454,55	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	200.395.454,55	PBH, PBK
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.454,55	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>22.800.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.800.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	22.800.000,00	DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.600.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	43.600.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	43.600.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>139.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.034.069.240,69	
		SURPLUS / (DEFISIT)	353.052.243,31	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	185.074.786,69	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	538.127.030,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(353.052.243,31)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

900/.../438.7.10.18/2025

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN ini dibuat pada hari ini:

Oleh dan diantara:

- (1) Nama : Ahwan, SH
Jabatan : Kepala Desa Panjunan
Alamat : Jl. Balaidesa No. 5 Panjunan Kecamatan Sukodono

Selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**

- (2) Nama : Khoirul Soleh
Jabatan : Ketua BPD
Alamat : Jl. Balaidesa No. 5 Panjunan Kecamatan Sukodono

Selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**

Pfghihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"Para Pihak"**. Para Pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa, berdasarkan Kesepakatan, Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak untuk menerima Dokumen tersebut dari Pihak Pertama.
- (2) Bahwa, Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara ini adalah dokumen-dokumen sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Keterangan
1	Perdes APBDES Tahun 2025	08	31-12-2025	
2.	Perkades Penjabaran APBDES Tahun 2025	04	31-12-2025	

- (3) **Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyerahkan Dokumen kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menerima Dokumen tersebut dari Pihak Pertama.**
- (4) Bahwa dengan telah dilakukannya serah terima Dokumen tersebut sebagaimana dimaksud dalam Butir (3) diatas, maka kewajiban Pihak Pertama untuk menyerahkan Dokumen kepada Pihak Kedua dan hak Pihak Kedua untuk menerima Dokumen tersebut dari Pihak Pertama telah dilaksanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat di tempat dan pada waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Berita Acara ini.



Para Pihak,





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA PANJUNAN

JL. BALAI DESA NO. 05 DESA PANJUNAN KECAMTAN SUKODONO
Telepon. 087765511017
Email : desapanjunan.sukodono@gmail.com Website :sidoarjokab.go.id

Panjunan, 21 Desember 2025

Kepada

Sdr. Ketua BPD Desa Panjunan

di

Sukodono

Nomor : 900.1.2/126/438.7.10.18/2025 Yth
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draft Peraturan Desa
Tentang APBDes Tahun Anggaran
2026

Bersama ini disampaikan dengan hormat Draft Rancangan Peraturan Desa Nomor 08 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Tahun Anggaran 2026.

Perihal sebagaimana dimaksud, mohon segera dibahas di Internal Badan Permusyawaratan Desa

Demikian Pemberitahuan Kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHWAN, SH

AHWAN, SH

-
NIP.-

Tembusan:
1. Yth. Sdr Ketua BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN BPD PANJUNAN
Nomor : 08/BPD/XII/438.7.10.18/2025

T E N T A N G
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA PANJUNAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANJUNAN
TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
- 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

- 8 Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
- 33 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
- 34 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
- 35 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
- 36 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
- 37 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);

- 38 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
- 39 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- 40 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 41 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 62 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Desa Panjunan Pada tanggal 31 Desember 2025 tentang Kesepakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA PANJUNAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KEDUA : Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| I. Pendapatan Desa | : Rp. 2.387.121.484,00,- |
| II. Belanja Desa | : Rp. 2.034.069.240,31,- |
| III. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 185.074.786,69,- |
| IV. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 538.127.030,00,- |

Ditetapkan di : Panjunan
Pada tanggal : 31 Desember 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

BERITA - ACARA
Nomor 08/BPD/XII/438.7.10.18/2025


Sidang Pleno Badan Permusyawaratan Desa Panjunan Pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2025 Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB. Bertempat di Balai Desa Panjunan Kecamatan Sukodono dengan agenda penetapan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyetakati Peraturan Desa tentang APBDes Panjunan Tahun 2026.
2. Mensosialisasikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2026 kepada warga Desa Panjunan


No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	KHOIRUL SOLEH	Ketua	1..... 
2.	M. NURUL HUDA, SE	Wakil Ketua	2..... 
3.	MULIYANI, S.Pd. AUD	Sekretaris	3..... 
4.	ROMI ANDI ROMA	Anggota	4..... 
5.	AHMAD AS'ARI	Anggota	5..... 

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

KETUA



KHOIRUL SOLEH



Panjunan, 31 Desember 2025
SEKRETARIS



MULIYANI, S. Pd. AUD



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA PANJUNAN

Alamat : Jl. Balai Desa No.5 Panjunan Sukodono Tlp (031) 7877115

NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH DESA PANJUNAN

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
Peserta : 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panjunan
2. Pemerintah Desa Panjunan

I. Susunan Acara :

- Pembukaan
- Penyampaian Materi Pokok “ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2026”.
- Pembahasan Materi
- Kesimpulan/Penutup.

II. Pembahasan

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026, antara anggota BPD beserta Pemerintah Desa telah sepakat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dimaksud.

III. Kesimpulan hasil rapat :


1. Dalam Musyawarah Desa tersebut telah disepakati antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Desa	Rp 2.387.121.484,00,-
- Belanja Desa	Rp 2.034.069.240,67,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.092.645.461,59,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 735.423.779,10
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 22.800.000,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 43.600.000,00,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 139.600.000,00,-</u>
Jumlah Belanja	Rp 2.034.069.240,69,-
Surplus / Defisit	Rp 353.052.243,31,-
- Pembiayaan Desa	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 185.074.786,69,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 538.127.030,00,-
Selisih pembiayaan (a-b)	(Rp. 353.052.243,31),-
Selisih Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp 0,00

Demikian Berita acara ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

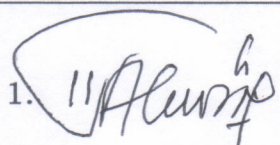
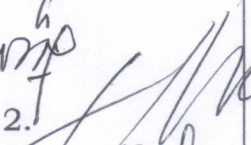

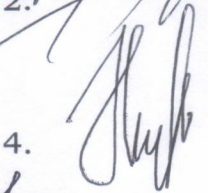

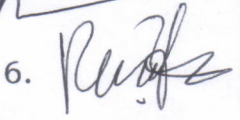
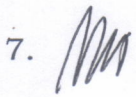
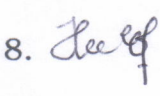
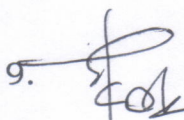
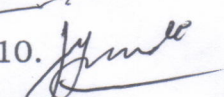
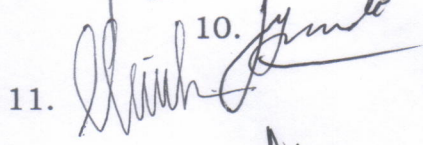
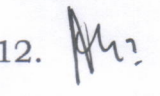
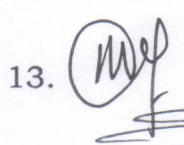
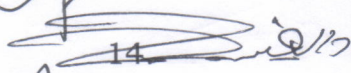
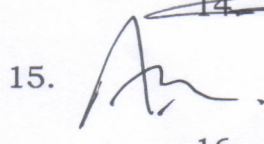
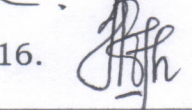
Mengetahui

KEPADA BPD PANJUNAN

KHOIRIL SOLEH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 KEPALA DESA PANJUNAN

AWAN, SH

Daftar hadir : Rapat Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tempat : Balai Desa Panjunan
 Acara : Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. AHWAN, SH	Kepala Desa	1. 
2.	H. ACHMAD MIFTACH K	Sekdes	2. 
3.	QUROTA A'YUNIN	Kasun Babatan	3. 
4.	MOCH MUHARDI	Kasun Panjunan	4. 
5.	MOH SHOLEH	Kasi Pemerintahan	5. 
6.	RETNO PUSPITA	Kasi Pelayanan	6. 
7.	M. MIFTAHUSSOFFAN	Kasi Kesra	7. 
8.	TRI UTAPIYANI	Kaur Keuangan	8. 
9.	DENOK SANCA	Kaur TU & UMUM	9. 
10	WAHYUDI ISMAIL	Kaur Perencanaan	10. 
11	KHOIRUL SOLEH	Ketua BPD	11. 
12	M. NURUL HUDA, SE	Wakil Ketua	12. 
13	MULIYANI, S.Pd. AUD	Sekretaris BPD	13. 
14	ROMI ANDI ROMA	Anggota BPD	14. 
15	AHMAD AS'ARI	Anggota BPD	15. 
16	ROSIDAH	Staff	16. 

KEPALA DESA PANJUNAN

 H. AHWAN, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA PANJUNAN

JL. BALAI DESA NO. 05 DESA PANJUNAN KECAMTAN SUKODONO
Telepon. 087765511017
Email : desapanjunan.sukodono@gmail.com Website :sidoarjokab.go.id

Panjunan, 23 Desember 2025

Kepada

Sdr. Bapak Camat Sukodono

di

Sukodono

Nomor : 900.1.2/127/438.7.10.18/2025 Yth
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Evaluasi Draft Rancangan
Perdes APBDes Desa Panjunan Tahun
Anggaran 2026

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat Sukodono untuk melakukan Evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Desa Panjunan Nomor 08 Tahun Anggaran 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjunan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana berkas terlampir;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Panjunan Nomor 04 Tahun Anggaran 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjunan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHWAN, SH

AHWAN, SH

-

NIP.-

Tembusan:
1. Yth. Sdr Ketua BPD



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi Telp. (031) 99036539

Email: sukodono@sidoarjokab.go.id

SUKODONO - SIDOARJO

BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026 DESA PANJUNAN, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH TIGA bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

A. DASAR HUKUM

Evaluasi APBDesa ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Pemerintah Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
14. Rancangan Peraturan Desa Panjunan tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
15. Surat Kepala Desa Panjunan tanggal 23 Desember 2025 Nomor: 900.1.2/127/438.7.10.18/2025 perihal Permohonan Evaluasi Draft Rancangan Perdes APBDes Desa Panjunan Tahun Anggaran 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Panjunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, serta prioritas pembangunan desa.

C. PELAKSANAAN EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi APBDesa Kecamatan Sukodono bersama Pemerintah Desa Panjunan dan BPD Panjunan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen APBDesa;
- Penelaahan Proporsi Belanja Operasional (Komposisi Belanja APBDesa);
- Penelaahan struktur APBDesa (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan);
- Penilaian kesesuaian prioritas penggunaan anggaran;
- Penyusunan catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.

D. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Panjunan, diperoleh hasil sebagai berikut:

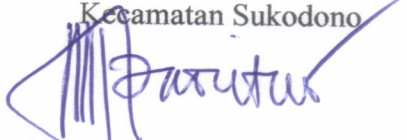
1. Secara umum, struktur APBDesa **sudah** disusun sesuai dengan ketentuan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 dan Perbup Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025;
2. **Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi;
3. **Pemerintah Desa Panjunan wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari** sejak berita acara ini ditetapkan.

E. PENUTUP

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Panjunan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukodono, 23 Desember 2025

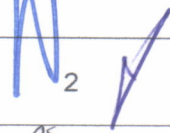
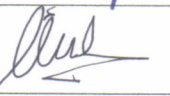

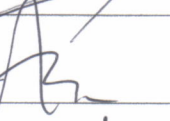
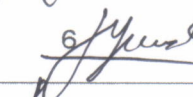
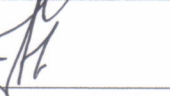


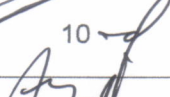
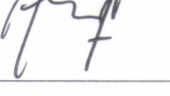
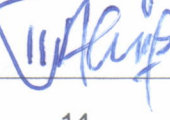
PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Evaluasi APBDesa
Kecamatan Sukodono


WILLY RADITYO, S.STP.
NIP. 198105101999121002

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Panjunan

AHWAN

**DAFTAR HADIR
EVALUASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026
DESA PANJUNAN KECAMATAN SUKODONO**

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	ARDI ANINDITA, S.STP.,M.Sosio.	Camat / Pengarah dan Penanggungjawab	Kec. Sukodono	1 
2	WILLY RADITYO, S.STP.	Ketua Tim Evaluasi	Kec. Sukodono	2 
3	Khondidoleh	BPD	Kec. Sukodono	3 
4	ACH. RAFTACH K.	Sekdes	"	4 
5	Ahmed Ariari	BPD	"	5 
6	Wahyoo &	Kasub Pencapaian	Desa Panjungan.	6 
7	Nur Lailiyana &	Pendamping Desa	P3MD Kecamatan Desa	7 
8	Tri Uaproni	Kasub Humas	Desa Panjunan	8 
9	Indono	Kasub Pencapaian	Kec Sukodono	9 
10	Istam	Staf	"	10 
11	Swabuan	"	"	11 
12	Maudy Nur Ariqanti	"	"	12 
13	AIWAN	Kades	Panjungan	13 
14				14
15				15

Lampiran 2 : Berita Acara Hasil Evaluasi APBDesa 2026

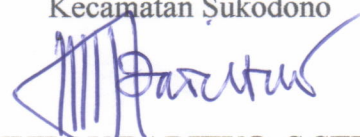
**TABEL CATATAN DAN REKOMENDASI
HASIL EVALUASI APBDESA TA 2026
DESA PANJUNAN KECAMATAN SUKODONO**

No.	Bidang/ Komponen	Uraian Temuan	Dasar Regulasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut Desa
1	Pagu Pendapatan	Sudah sesuai	Perbup 58/2025	Harap disesuaikan dengan Perbup 58 Th 2025	
2	Bidang 1	<ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan kedudukan BPD 10 bulan ADD 2 bulan PBH - Penggunaan Ops 3% DDS kurang relevan - Tunj purna bhakti kades 20jt - Anggaran musyawarah desa masih pakai DDS - Supporting Pilkades dari PBH - Jasa honorarium petugas Optimalisasi PBB 	<p>Perbup 64/2025</p> <p>Perbup 65/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tunj kedudukan BPD boleh dipenuhi dari PBH setelah kewajiban 20% PBH - Optimalisasi PBB Terpenuhi - 3% DDS bisa digunakan untuk: 01 belanja koordinasi pemerintah desa, 02 Biaya penanggulangan kerawanan social, 03 Belanja kegiatan ceremonial - Tunja purna bhakti kades mengikuti regulasi yang ada - Anggaran musdes selain DDS - Musdesus KPM BLT-DD pakai DDS - Supporting pilkades tidak boleh sama dengan RAB BKK Pilkades - Jasa honorarium petugas Optimalisasi PBB diganti honor narsum 	
3	Bidang 2	<ul style="list-style-type: none"> - Angaran dukungan PAUD desa dari DDS - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat tidak spesifik - Sarpras TK dari DDS - Pembelian obat poskesdes pakai DDS - Mamin kader posyandu - Satuan nominal PMT Balita kurang relevan - Kegiatan honor narsum RDS - SOTH tidak ada banner dan bantans peserta - Nilai Honor instruktur senam tidak tepat - Belanja modal pengurangan makam 	<p>Perbup 64/2025</p> <p>Perbup 65/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Angaran dukungan PAUD desa dari DDS hanya boleh jika PAUD milik desa - Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat diperjelas tema kegiatannya - Sarpras TK dari DDS tidak diperkenankan jika bukan milik Desa - Pembelian obat poskesdes harus ada dasar surat dari Dinkes - Mamin kader posyandi harap disesuaikan kembali - Nominal PMT Balita dirinci sesuai kebutuhan riil - Kegiatan honor narsum RDS harus ada kegiatan pelatihan - SOTH bisa dibuatkan banner dan bantrans peserta - Nilai honor instruktur senam max 500k - Realisasi belanja modal pengurangan makam menunggu petunjuk lebih lanjut 	
4	Bidang 3	- Honor pembantu modin	<p>Perbup 64/2025</p> <p>Perbup 65/2025</p>	- Honor pembantu modin dari DLL dirinci satuan dan jumlahnya	
5	Bidang 4	- Belanja modal mesin jahit dari DDS	<p>Perbup 64/2025</p> <p>Perbup 65/2025</p>	- Belanja modal mesin jahit dari DDS harus jadi aset desa	
6	Bidang 5	<ul style="list-style-type: none"> - dianggarkan BTT Penanggulangan Becana sesuai ketentuan - dianggarkan BLT DD sesuai ketentuan 	<p>Perbup 64/2025</p> <p>Perbup 65/2025</p>	- Sesuai Perbup 58 Th 2025	

Sukodono, 23 Desember 2025

Catatan : - Seluruh rekomendasi bersifat wajib untuk ditindaklanjuti;
- Hasil perbaikan menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026




Ketua Tim Evaluasi APBDesa
Kecamatan Sukodono



WILLY RADITYO, S.STP.
NIP. 198105101999121002

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA PANJUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	666.130.000,00	507.240.000,00	76,15	158.890.000,00	23,85
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.749.604,61	5.500.000,00	1,92	280.249.604,61	98,08
5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	100,00
	Jumlah	968.379.604,61	512.740.000,00	52,95	455.639.604,61	47,05
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i>			Komposisi Belanja Operasional		52,95 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		47,05 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf :		Paraf :		Paraf :		
Nama :	Atdi Minda, S-Str, M-Brh	Nama :	Waly Radityo, S-Str	Nama :	Kridodo Widy Pradhyo, S-Str	
NIP :	1080830 20012 103	NIP :	1010516 19912 102	NIP :	19921014 20109 101	
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa			Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :			

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO
 KECAMATAN : KECAMATAN SUKODONO
 DESA : PEMERINTAH DESA PANJUNAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : 23-12-2025</p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi , Nama : Muly Radityo, S-SP. NIP : 108120199121002 Jabatan : Sekretaris Camat Sulideno</p>					



PERATURAN KEPALA DESA PANJUNAN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN

BELANJA DESA PANJUNAN TAHUN 2026



DESA PANJUNAN

KECAMATAN SUKODONO



KEPALA DESA PANJUNAN
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA PANJUNAN
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANJUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANJUNAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permendes PDTT RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2024 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa , BK ADD Operasional, BKK Dana Desa, BKK Pemilihan Kepala Desa, BKK Renovasi Warung, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024;

11. Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor : S-128/PK/2024 perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2025 pada Website DJPK;
12. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo;
13. Surat Kepala Dinas PMD Sidoarjo tanggal 12 Desember Tahun 2024 Nomor 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 Perihal Penyampaian Rincian Besaran Pagu Indikatif per Desa Tahun Anggaran 2025;
14. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2025;
15. Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2023 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Panjunan (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Panjunan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Panjunan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJM Desa Panjunan Periode Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Panjunan Nomor 05 Tahun 2024 Tentang RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panjunan Tahun 2024 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANJUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 32,850,000.00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1,841,348,240.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 48,000,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp 1,922,198,240.00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1,008,509,667.10
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 828,112,100.00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	22,800,000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	249,498,800.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	139,600,000.00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2,248,520.567.10</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(326,322,327.10)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	326,322,327.10
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>326,322,327.10</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0.00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Panjunan

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA,

H. AHWAN, SH



Diundangkan di : Desa Panjunan

Pada tanggal : 31 December 2024

SEKRETARIS DESA


H. ACH. MIFTACH KURNIAWAN



BERITA DESA PANJUNAN TAHUN 2024 NOMOR 07

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANJUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			47.850.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			3.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			3.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			44.850.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			44.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.291.271.484,00	
	4.2.1.	Dana Desa			940.244.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			940.244.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			526.922.639,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			526.922.639,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			424.104.845,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			424.104.845,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			400.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			400.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			48.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			48.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			48.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.387.121.484,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.092.645.461,59	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			867.890.422,79	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	OB	72.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			72.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	9	OB	383.040.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			383.040.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			383.040.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			319.200.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			63.840.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	156.053.102,79	ADD, DLL, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			156.053.102,79	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			35.953.102,79	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.727.929,12	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			7.014.355,49	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.700.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.400.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.110.818,18	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			76.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			30.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			46.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			26.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			22.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			17.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			11.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.92	Belanja Jasa Domain Desa			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	5	OB	52.200.000,00	ADD, PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			52.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			52.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			52.200.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	5.500.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	28.207.320,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.207.320,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa /			10.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.707.320,00	
1.01.08.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			13.707.320,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.90.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	12	Bulan	26.680.000,00	PAD, PBH
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			26.680.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			26.680.000,00	
1.01.90.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			12.900.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.94	Uang Makan			5.280.000,00	
1.01.91.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	12	Bulan	124.210.000,00	PAD, PBH
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			124.210.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			124.210.000,00	
1.01.91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			28.440.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			34.950.000,00	
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			13.300.000,00	
1.01.91.	5.1.2.94	Uang Makan			47.520.000,00	
1.01.93.		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	12	Bulan	20.000.000,00	PBH
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			20.000.000,00	
1.01.93.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			20.000.000,00	
1.01.93.	5.1.1.93	Purna Bakti Kepala Desa			20.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			10.500.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	Bulan	3.000.000,00	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			3.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			3.000.000,00	
1.02.91.		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STNK;BPKB;dll)	12	Bulan	7.500.000,00	PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.500.000,00	
1.02.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.500.000,00	
1.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			29.500.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12	Bulan	24.000.000,00	DLL
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			24.000.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12	Bulan	5.500.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.800.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.700.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			52.325.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12	Bulan	10.950.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.950.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.550.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.150.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
1.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			350.000,00	
1.04.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			300.000,00	
1.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.250.000,00	
1.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.250.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12	Bulan	9.150.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.150.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.150.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.350.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	6.950.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.950.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.950.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			850.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12	Bulan	2.750.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.750.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			350.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	12	Bulan	16.900.000,00	PBH
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.900.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.950.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
1.04.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.950.000,00	
1.04.10.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.950.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	12	Bulan	5.625.000,00	PBH
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.625.000,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.125.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
1.04.11.	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Juri Lomba			2.500.000,00	
1.04.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
1.04.11.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			132.430.038,80	
1.05.91.		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12	Bulan	132.430.038,80	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			132.430.038,80	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.05.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			350.000,00	
1.05.91.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa /			25.000.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.900.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
1.05.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
1.05.91.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			900.000,00	
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	
1.05.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			82.045.511,00	
1.05.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			82.045.511,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.884.527,80	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			12.884.527,80	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			735.423.779,10	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			49.300.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	19.200.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa			19.200.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12	Bulan	13.600.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.600.000,00	
2.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.600.000,00	
2.01.02.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
2.01.02.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			10.000.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12	Bulan	16.500.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.500.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
2.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
2.01.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			5.000.000,00	
2.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
2.01.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			235.332.870,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	Bulan	12.200.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.200.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.200.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			650.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			7.500.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	12	Bulan	94.500.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			94.500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			73.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.400.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			65.100.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			21.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			21.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	Bulan	98.032.870,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			95.050.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			34.950.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.850.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			18.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.550.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.800.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			750.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.350.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.950.000,00	
2.02.04.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			600.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.750.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			9.750.000,00	
2.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	
2.02.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			10.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			16.000.000,00	
2.02.04.	5.3.	Belanja Modal			2.982.870,00	
2.02.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.982.870,00	
2.02.04.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			2.982.870,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12	Bulan	12.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.400.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.700.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00	
2.02.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
2.02.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
2.02.06.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.700.000,00	
2.02.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.700.000,00	
2.02.90.		Penyelenggaraan Senam Desa	12	Bulan	18.200.000,00	PBH
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.200.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
2.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.200.000,00	
2.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.200.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			450.790.909,10	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	12	Bulan	50.000.000,00	DDS
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			50.000.000,00	
2.03.05.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			50.000.000,00	
2.03.05.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			50.000.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	12	Bulan	200.395.454,55	PBH, PBK
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			395.454,55	
2.03.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			395.454,55	
2.03.11.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			395.454,55	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			200.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			200.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			51.165.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			145.335.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			2.100.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			500.000,00	
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	12	Bulan	200.395.454,55	PBH, PBK
2.03.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			395.454,55	
2.03.16.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			395.454,55	
2.03.16.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			395.454,55	
2.03.16.	5.3.	Belanja Modal			200.000.000,00	
2.03.16.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			200.000.000,00	
2.03.16.	5.3.1.04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah			200.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			22.800.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			22.800.000,00	
3.02.90.		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)			22.800.000,00	DLL
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.800.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.800.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			22.800.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			43.600.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			43.600.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12	Bulan	43.600.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			43.600.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			39.000.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.600.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.600.000,00	
4.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.500.000,00	
4.04.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.100.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			139.600.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			10.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Tahun	10.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			129.600.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	129.600.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.034.069.240,69	
		SURPLUS DEFISIT			353.052.243,31	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			185.074.786,69	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			185.074.786,69	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			185.074.786,69	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			538.127.030,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			538.127.030,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			538.127.030,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			353.052.243,31	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					0,00	

